



Pengaruh Otonomi Daerah Dengan Sistem Pemerintahan Desa Terhadap pembangunan Desa Di Desa Siholi Kecamatan Boronado Kabupaten Nias Selatan

Yafaeli Giawa¹, Hidaman Hulu², Nurul Dalimunte³

^{1,2,3} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Alamat : Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214

Email: ttttgvvvvvvvvv;l@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Otonomi Daerah Dengan Sistem Pemerintahan Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Siholi Kecamatan Boronado Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Variabel Bebas (X) Otonomi Daerah dan Variabel Terikat (Y) Pembangunan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa. Penelitian ini dilakukan di desa Siholi Kecamatan Boronado Kabupaten Nias Selatan. Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh aparat desa dan masyarakat desa Siholi yang berjumlah 300 orang. Jadi yang menjadi sampel penelitian ini adalah 75 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu interview (wawancara), questioner (angket), dan observasi. Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment dan uji signifikan. Berdasarkan pengolahan data bahwa hasil nilai r tabel product moment dengan $r_{hitung} = 0,39 > r_{tabel} 0,216$ dan taraf kepercayaan 95% atau kesalahan 5% adalah 0,216. Dengan demikian bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$. Ini berarti ada pengaruh besar antara Otonomi Daerah Dengan Pembangunan Desa. Dengan demikian hipotesis dapat diterima, yaitu dengan besarnya Pengaruh Otonomi Daerah Dengan Sistem Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Siholi Kecamatan Boronado Kabupaten Nias Selatan.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pembangunan Desa, Pemerintahan

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai produk administrasi Negara

kecenderungannya semakin meningkat secara kuantitatif sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam Negara kesejahteraan.

Realisasi otonomi daerah itu tidak hanya ditingkat kabupaten/kota namun berpengaruh kepada sistem pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa desa di Kabupaten/Kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai masyarakat adat yang memiliki otonomi maka desa merupakan subyek hukum. Taliziduhu Ndraha (kutipan nurcholis hanif 2011:21) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum.

Dari alinea diatas bahwa adanya keterkaitan antara otonomi daerah dan sistem pemerintahan desa serta pembangunan desa sehingga penulis menetapkan penelitian Pengaruh Otonomi Daerah Dengan Sistem Pemerintahan Desa Terhadap pembangunan Desa Di Desa Siholi Kecamatan Boronado Kabupaten Nias Selatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kuantitatif ini peneliti adalah instrumen. Validitas dan metode-metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan kecermatan yang melakukan kerja lapangan (Suyanto, 2011:168-169). Penelitian ini dilakukan Di Desa Siholi Kecamatan Boronado Kabupaten Nias Selatan. Menurut Sugiyono (2017:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh Aparatur Desa dan masyarakat Desa Siholi Kecamatan Beronado Kabupaten Nias Selatan yang berjumlah 13 orang dan jumlah penduduk 287 orang. Jadi jumlah populasi adalah sebanyak 300 orang. Jumlah sampel yang didapatkan berdasarkan rumus slovin adalah 75 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, interview dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian yang akan dikemukakan maka diperoleh berdasarkan data primer, menyangkut tentang karakteristik responden, tanggapan responden terhadap variabel bebas (X) Pengelolaan Dana Desa dan variabel terikat (Y) Pembangunan Desa di Desa Siholi Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan hasil angket yang disebarakan pada responden sesuai 20 (dua puluh) item pernyataan untuk variabel bebas dan 20 (dua

puluh) item pernyataan untuk variabel terikat dengan jumlah responden 75 orang diperoleh hasil sebagai berikut .

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui rata-rata jawaban responden terhadap variabel bebas (X) Pengelolaan Dana Desa adalah 64,70 angka ini tergolong sangat tinggi. Artinya Pengelolaan Dana Desa di Desa Siholi Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan yang sedang dilaksanakan dalam proses baik.

Tabel 1. Tabulasi Data Jawaban Responden Terhadap Item Pertanyaan Variabel Bebas (X)
Pengelolaan Dana Desa

No	Item-Item Pertanyaan	Sl	Sr	KK	Jr	TP	Jlh Skor	Rata- Rata	Kategori
1	Perencanaan pengelolaan dana desa selalu untuk kebaikan masyarakat desa.	27	16	12	2	-	239	4,19	Tinggi
2	Pemerintahan desa selalu menerima dan mengeluarkan anggaran dalam APB Desa	26	15	14	2	-	236	4,14	Tinggi
3	Masyarakat desa selalu menikmati Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB) Desa	28	13	15	1	-	239	4,19	Tinggi
4	Pemerintahan desa selalu merencanakan program kegiatan desa	27	20	9	1	-	224	3,39	Sedang
5	Pemerintahan desa melaksanakan pengelolaan dana desa secara professional	30	18	8	1	-	248	4,35	Sangat Tinggi
6	Pemerintahan desa mengelola keuangan desa melalui rekening kas Desa	28	22	6	1	-	248	4,35	Sangat Tinggi
7	Apatur desa dapat memahami aplikasi sistem keuangan desa (SisKeuDes)perundang undangan	26	14	14	3	-	234	4,10	Tinggi
8	Pemerintahan desa sudah melaksanakan dana desa sesuai dengan tujuan mengentaskan kemiskinan desa	22	24	9	2	-	237	4,15	Tinggi
9	Masyarakat desa selalu merasa puas kepada	30	16	11	-	-	247	4,33	Sangat Tinggi

	pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pengelolaan dana desa.									
10	Kaur Umum dan Tata usaha Desa sudah memahami tugasnya sebagai penanggungjawab keuangan desa	32	18	7	-	-	253	4,43	Sangat Tinggi	
11	Kaur Umum dan Tata usaha desa dapat memahami tugas dan fungsi kebendaharaanya	26	22	6	3	-	242	4,24	Sangat Tinggi	
12	Kaur Umum dan Tata Usaha Desa dapat bertanggungjawab atas fungsi dan tugas kebendaharaanya	22	24	10	1	-	238	4,17	Tinggi	
13	Kaur Umum dan Tata usaha Desa selalu mencatat pendapatan dan pengeluaran dana desa	26	20	11	-	-	243	4,26	Sangat Tinggi	
14	Kepala desa selalu mengontrol hasil pekerjaan Kaur Umum dan Tata Usaha Desa	26	20	11	-	-	245	4,29	Sangat Tinggi	
15	Kepala desa selalu mengontrol hasil pekerjaan Kaur Umum dan Tata Usaha Desa	27	20	10	-	-	245	4,29	Sangat Tinggi	
16	Kepala desa dapat mengetahui contoh format dalam laporan pelaksanaan APB Desa	27	20	10	-	-	245	4,29	Sangat Tinggi	
17	Kepala desa selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali kota melaui Camat kota melalui Camat	20	27	10	-	-	245	4,29	Sangat Tinggi	
18	Adanya pembinaan dan pengawasan dari Menteri Keuangan Desa terhadap pengelolaan dana desa	28	20	8	1	-	246	4,31	Sangat Tinggi	
19	Masyarakat desa mengetahui bahwa selalu adanya	22	26	7	2	-	239	4,19	Tinggi	

20	pengawasan dari Menteri Keuangan Desa Kepala desa mampu mengantisipasi bila mana akan terjadi sesuatu dalam pembangunan de Masyarakat desa mengetahui pemerintahan Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dana desa sa	27	20	7	3	-	242	4,24	Sangat Tinggi
								4,20	

Dari tabel di atas dapat diketahui rata-rata jawaban responden untuk variabel bebas (X) Pengelolaan Dana Desa adalah 4,20 angka ini tergolong pada angka 3,43 s/d 4,23 yaitu kategori tinggi artinya Pengelolaan Dana Desa yang sedang dilaksanakan di Desa Siholi Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan dikategorikan dengan klasifikasi baik.

Angka koefisien korelasi $r_{xy} = 0,39$ dapat diketahui pengaruh variabel bebas (X) Pengelolaan Dana Desa dengan variabel terikat (Y) Pembangunan Desa yang besarnya 0,39. Menurut Interpretasi Koefisien Korelasi (Sugiyono, 2019:214), maka pengaruh antara variabel bebas (X) Pengelolaan Dana Desa dan Variabel Terikat (Y) Pembangunan Desa termasuk dalam kategori rendah. Jadi, terdapat pengaruh yang rendah antara Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa pada Desa Siholi Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan.

Pengaruh variabel bebas (X) Pengelolaan Dana Desa terhadap variabel terikat (Y) Pembangunan Desa di Desa Siholi Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, memiliki tingkat pengaruh yang rendah disebabkan karena pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Siholi Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan masih memiliki kelemahan-kelemahan yang menurut peneliti dapat mempengaruhi pembangunan desa.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat berada di objek penelitian di Desa Siholi Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa seperti kegiatan pada perencanaan pengelolaan dana desa yang masih belum menjadi kebaikan masyarakat desa, termasuk dalam program perencanaan pembangunan desa yang meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, dan

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang belum tersampaikan kepada masyarakat desa.

Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Urusan Umum dan tata usaha desa seperti pada kegiatan pencatatan pendapatan dan pengeluaran dana desa, serta kerjasama desa yang kurang berjalan dengan baik seperti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antara desa dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Maka dari itu pembangunan desa tidak berjalan dengan baik, akibat dari pengelolaan dana desa yang buruk. Jadi, itulah sebabnya pengaruh pengelolaan dana desa memiliki tingkat pengaruh yang rendah terhadap pembangunan desa di Desa Siholi Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pengolahan data maka diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh pengelolaan dana desa memiliki tingkat pengaruh yang rendah terhadap pembangunan di Desa Siholi Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, ini disebabkan karena pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Siholi Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan masih memiliki banyak kelemahan-kelemahan yang menurut peneliti dapat mempengaruhi pembangunan.

Seperti kegiatan pada perencanaan pengelolaan dana desa yang belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk dalam program perencanaan pembangunan desa yang meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang belum tersampaikan kepada masyarakat desa.

Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan dan tata usaha desa seperti pada kegiatan pencatatan pendapatan dan pengeluaran dana desa, serta kerjasama desa yang kurang berjalan dengan baik seperti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antara desa dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat di Desa Siholi Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrahmaulyana, A. (2021). Pengaruh Jumlah Tanggungan, Pendapatan dan Pendidikan Kepala Keluarga Terhadap Tingkat Pendidikan Anak di Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. ICOR: Journal of Regional Economics, 2(3), 41-51.
- Garis, R. R. (2017). Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di Kabupaten Ciamis (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis). Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(2), 108-130.
- Marbun, B.N. 2015. Proses Pembangunan Desa Jakarta : Erlangga.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Alfabeta.
- Muhammad, R. F., Arifin, M. Z., & Zulfiani, D. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LABANAN MAKARTI KECAMATAN TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU.
- Mulyadi Mohammad, 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Yogyakarta : Nadi Pustaka
- Rahardjo Muhamad Mu'iz, 2020. Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Bumi Aksara : Sinar Grafikat Ofsset.
- Rosidin, U. (2019). Pemberdayaan desa dalam sistem pemerintahan daerah: perspektif Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. (No Title).
- Setyadi Erwin, 2020. Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta : PT Gramedia.
- Siagian Sondang P. 2016. Administrasi Pembangunan Jakarta : PT Bumi Aksara
- Soimin, 2019. Pembangunan Berbasis Desa. Citra Intrans Selaras : Intrans Publishing.
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
- Suryaningrat Bayu. 2015. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan edisi revisi. Jakarta : Aksara Baru.
- Vikra, A. A., Prabowo, H., & Pudjianto, W. S. (2023). Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Subang. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 4(1), 388-400.
- Yani, J. A., Mangkunegara, A. A. A. P., & Aditama, R. (1995). Sugiyono. 2017, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. bandung: Alfabeta. Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, Diktat Ku.